

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM)

Ikatan Akuntan Indonesia telah menerbitkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi keuangan pada tanggal 24 Oktober 2016 dan mulai berlaku efektif pada 1 Januari 2018. Menurut IAI dalam SAK EMKM (2018), “SAK EMKM adalah standar akuntansi keuangan yang berdiri sendiri, dirancang untuk digunakan oleh entitas yang memenuhi definisi entitas tanpa akuntabilitas publik yang signifikan sebagaimana diatur dalam SAK ETAP dan karakteristik yang tercantum dalam Undang-Undang No 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)”. SAK EMKM secara jelas menggambarkan konsep entitas bisnis sebagai salah satu asumsi dasar, sehingga untuk menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM, entitas harus dapat memisahkan kekayaan pribadi pemilik dari kekayaan dan hasil usaha entitas tersebut, serta memisahkan antara satu usaha/entitas dengan usaha/entitas lainnya.

Menurut SAK EMKM (2018:43), Dibandingkan dengan SAK lainnya, SAK EMKM dirancang lebih sederhana karena mengatur transaksi umum yang dilakukan oleh EMKM dan dasar pengukurannya sepenuhnya menggunakan biaya historis, sehingga EMKM cukup mencatat aset dan liabilitasnya sebesar biaya perolehannya. Dalam SAK EMKM, laporan keuangan terdiri dari 3 laporan keuangan yaitu diantaranya adalah laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan catatan atas laporan keuangan. Entitas yang memenuhi syarat untuk menggunakan SAK EMKM ini tetap harus mempertimbangkan apakah ketentuan yang diatur dalam SAK EMKM sesuai dan memenuhi kebutuhan pelaporan keuangan entitas tersebut. Oleh karena itu, entitas perlu menimbang kerangka pelaporan keuangan yang akan diterapkan, apakah berdasarkan SAK EMKM atau SAK lainnya, dengan mempertimbangkan kemudahan yang ditawarkan oleh SAK EMKM dan kebutuhan informasi pengguna laporan keuangan entitas tersebut.

2.1.1 Pengertian UMKM

Berdasarkan undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil dan menengah, didefinisikan sebagai berikut :

1. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro.
2. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar.
3. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang usaha yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar.

Berdasarkan beberapa defisini diatas, dapat dikatan bahwa UMKM merupakan usaha yang dimiliki oleh perserorangan atau badan usaha sesuai dengan kriteria yang terdapat dalam undang-undang No. 20 Tahun 2008.

2.1.2 Kriteria UMKM

Menurut SAK EMKM (2018:42), sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 6 Undang-undang No. 20 Tahun 2008 bahwa Kriteria UMKM adalah sebagai berikut:

1. Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:
 - a) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
2. Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:
 - a) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
3. Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:
 - a) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

2.2 Pengertian Persediaan

Persediaan merupakan sumber pendapatan utama bagi perusahaan baik itu perusahaan dagang maupun perusahaan manufaktur. Hal tersebut karena sebagian besar kekayaan perusahaan ditanamkan dalam bentuk persediaan. Menurut Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK EMKM) No.9 tahun 2018, Persediaan adalah aset:

1. Untuk dijual dalam kegiatan usaha normal
2. Dalam proses produksi untuk kemudian dijual; atau
3. Dalam bentuk bahan atau perlengkapan untuk digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa.

Menurut Dunia & Mubarakah (2019:139), Persediaan dapat diartikan sebagai aset berwujud yang dimiliki oleh perusahaan mencakup beberapa kategori, seperti aset yang diperoleh untuk dijual kembali dalam kegiatan operasional perusahaan, aset yang masih dalam proses produksi untuk dijual di masa depan, serta bahan yang digunakan dalam proses produksi.

Menurut Samryn (2019:81), “Persediaan meliputi aktiva berwujud yang dimiliki dengan tujuan untuk dijual kembali atau digunakan dalam proses produksi.”

Berdasarkan definisi dari para ahli diatas, dapat dinyatakan bahwa persediaan adalah aset yang dimiliki perusahaan dengan tujuan untuk dijual kembali dalam kegiatan normal perusahaan atau barang yang masih dalam pengerjaan, ataupun barang dalam bentuk bahan baku yang menunggu penggunaannya dalam suatu proses produksi. Persediaan harus diperhatikan secara rutin agar kegiatan usaha perusahaan dapat berjalan dengan lancar.

2.3 Jenis-Jenis Persediaan

Persediaan dibagi menjadi beberapa jenis tergantung dari jenis perusahaan dan kegiatan usaha perusahaan yang bersangkutan, apakah itu perusahaan manufaktur atau perusahaan dagang. Weygandt, dkk (2018:296) menyatakan bahwa perusahaan manufaktur biasanya mengklasifikasikan persediaan menjadi 3 (tiga) kategori:

1. Persediaan barang jadi (*finished goods inventory*) merupakan barang produksi yang selesai diproses dan siap untuk dijual.

2. Persediaan dalam proses (*work in process inventory*) merupakan bagian persediaan barang produksi yang telah masuk proses produksi tetapi belum selesai.
3. Persediaan bahan baku (*raw materials*) merupakan barang-barang dasar yang akan digunakan dalam produksi tetapi belum dimasukkan ke dalam proses produksi.

Menurut Samryn (2019:81), Persediaan di perusahaan industri diklasifikasikan sebagai persediaan barang dalam proses, dan persediaan barang jadi. Persediaan barang yang dimiliki untuk mendukung pelaksanaan pekerjaan pabrik atau kantor disebut persediaan bahan pembantu. Pada perusahaan jasa persediaan biasanya hanya memiliki persediaan bahan-bahan pembantu yang nilainya relatif kecil.

Berdasarkan uraian diatas, dapat dinyatakan bahwa persediaan terbagi menjadi beberapa jenis sesuai dengan jenis dan kegiatan usaha perusahaan. Persediaan bagi perusahaan dagang adalah persediaan barang dagang, sedangkan bagi perusahaan manufaktur, persediaan terdiri dari tiga jenis, yaitu persediaan bahan baku (*raw materials*), persediaan barang dalam proses (*work in process inventory*) dan persediaan barang jadi (*finished goods inventory*).

2.4 Biaya-Biaya Persediaan

Dalam mengukur nilai persediaan terdapat beberapa biaya yang termasuk dalam biaya persediaan. PSAK 14 (Revisi 2018) menyatakan bahwa persediaan diukur berdasarkan biaya atau nilai realisasi neto dengan mengukur biaya paling rendah. Biaya persediaan terdiri dari:

1. Biaya Pembelian
Biaya pembelian persediaan meliputi harga beli, bea impor, pajak lainnya (selain yang dapat ditagih kembali setelahnya oleh entitas kepada otoritas pajak), biaya pengangkutan, biaya penanganan, dan biaya lainnya yang secara langsung dapat diatribusikan pada perolehan barang jadi, bahan, dan jasa. Diskon dagang, rabat, dan hal serupa lain yang dikurangkan dalam menentukan biaya pembelian.
2. Biaya Konversi
Biaya konversi persediaan meliputi biaya yang secara langsung terkait dengan unit yang diproduksi, seperti biaya tenaga kerja langsung. Termasuk juga alokasi sistematis overhead produksi tetap dan variabel yang timbul dalam mengonversi bahan menjadi barang jadi. Overhead produksi tetap adalah biaya produksi tidak langsung yang relatif konstan, tanpa memperhatikan volume produksi yang dihasilkan seperti penyusutan dan pemeliharaan, bangunan, dan peralatan pabrik, dan biaya manajemen dan

administrasi pabrik. Overhead produksi variabel adalah biaya produksi tidak langsung yang berubah secara langsung, atau hampir secara langsung, mengikuti perubahan volume produksi, seperti bahan tidak langsung dan biaya tenaga kerja tidak langsung.

3. Biaya Lain

Biaya – biaya lain yang termasuk dalam biaya persediaan hanya sepanjang biaya tersebut timbul agar persediaan berada dalam kondisi dan lokasi saat ini. Sebagai contoh, dalam keadaan tertentu diperkenankan untuk memasukkan overhead nonproduksi atau biaya perancangan produk untuk pelanggan tertentu sebagai biaya persediaan. Contoh biaya-biaya yang dikeluarkan dari biaya persediaan dan diakui sebagai beban pada periode terjadinya adalah :

- a) Jumlah yang tidak normal atas pemborosan bahan, tenaga kerja, atau biaya produksi lainnya;
- b) Biaya penyimpanan, kecuali biaya tersebut diperlukan dalam proses produksi sebelum dilanjutkan pada tahap produksi selanjutnya;
- c) Biaya administrasi dan umum yang tidak memberikan kontribusi untuk membuat persediaan berada dalam kondisi dan lokasi saat ini; dan
- d) Biaya Penjualan.

4. Biaya Persediaan Pemberi Jasa

Sepanjang pemberi jasa memiliki persediaan, maka pemberi jasa mengukur persediaan tersebut pada biaya produksinya. Biaya persediaan tersebut terutama meliputi biaya tenaga kerja dan biaya personalia lainnya yang secara langsung menangani pemberian jasa termasuk personalia penyelia, dan overhead yang dapat didistribusikan. Biaya tenaga kerja dan biaya lainnya yang terkait dengan personalia penjualan dan administrasi umum tidak termasuk sebagai biaya persediaan, tetapi diakui sebagai beban pada periode terjadinya. Biaya persediaan pemberi jasa tidak termasuk margin laba atau overhead yang tidak dapat didistribusikan yang sering merupakan faktor pembebanan harga oleh pemberi jasa.

5. Teknik Pengukuran Biaya

Teknik pengukuran, seperti metode biaya standar atau metode eceran, dapat digunakan untuk mengukur biaya persediaan jika hasilnya dapat memperkirakan biaya. Biaya standar menggunakan tingkat normal dari bahan dan perlengkapan, tenaga kerja, pemakaian yang efisien dan sesuai dengan kapasitas. Jika diperlukan, komponen – komponen tersebut ditelaah ulang secara regular dan (jika diperlukan) direvisi sesuai dengan kondisi sekarang. Dalam metode eceran, biaya persediaan diukur dengan mengurangi nilai jual persediaan dengan persentase margin keuntungan yang sesuai.

Menurut SAK EMKM No. 09 (2018:21), “Biaya perolehan persediaan mencakup seluruh biaya pembelian, biaya konversi, dan biaya lainnya yang terjadi untuk membawa persediaan ke kondisi dan lokasi siap digunakan.” Kebijakan akuntansi yang terdapat dalam SAK EMKM juga menyatakan bahwa

jika SAK EMKM secara spesifik mengatur perlakuan akuntansi atas suatu transaksi, peristiwa, atau keadaan lainnya, maka entitas menerapkan kebijakan akuntansi sesuai dengan penganturan yang ada dalam SAK EMKM, tetapi jika SAK EMKM tidak secara spesifik mengatur perlakuan akuntansi atas suatu transaksi, peristiwa, atau keadaan lainnya, maka entitas hanya mengacu pada dan mempertimbangkan definisi, kriteria pengakuan, dan konsep pengukuran untuk aset, liabilitas, penghasilan, dan beban, serta prinsip pervasive.

Berdasarkan uraian diatas dapat diartikan bahwa biaya persediaan adalah seluruh biaya pembelian ditambah biaya-biaya lainnya yang terjadi agar persediaan ke kondisi dan lokasi siap digunakan.

2.5 Sistem Pencatatan Persediaan

Dalam ilmu akuntansi, terdapat beberapa metode yang dapat digunakan perusahaan untuk mencatat persediaannya. Ada dua sistem yang dapat digunakan dalam hubungannya dengan pencatatan persediaan menurut Pura (2019:78), yaitu:

1. Sistem Periodik/Fisik

Penggunaan metode fisik mengharuskan adanya perhitungan barang yang masih ada pada tanggal penyusunan laporan keuangan. Perhitungan persediaan (*stock opname*) ini diperlukan untuk mengetahui berapa jumlah barang yang masih ada dan kemudian diperhitungkan harga pokoknya. Harga pokok penjualan dihitung sebagai nilai residu (selisih persediaan awal periode dan pembelian dengan persediaan akhir periode).

Perhitungan harga pokok penjualan dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Persediaan barang awal	Rp xxx
Ditambah: Pembelian (neto)	Rp xxx
Biaya angkut pembelian	<u>Rp xxx</u>
	Rp xxx
Dikurangi: Potongan pembelian	Rp xxx
Retur pembelian	<u>Rp xxx</u>
	<u>(Rp xxx)</u>
Pembelian bersih	<u>Rp xxx</u>
Persediaan barang yang tersedia dijual	Rp xxx
Dikurangi: Persediaan barang akhir	<u>(Rp xxx)</u>
Harga pokok penjualan	<u>Rp xxx</u>

2. Sistem Perpetual/Buku

Dalam sistem perpetual setiap transaksi pembelian dan penjualan dibuatkan catatan dalam pembukuan berupa kartu persediaan (*stock card*) sehingga nilai persediaan barang dapat diketahui setiap saat. Perhitungan fisik persediaan masih tetap diperlukan walaupun persediaan dapat ditentukan

melalui catatan yang diselenggarakan, karena kadang-kadang jumlah persediaan yang sebenarnya mungkin ada yang tidak sesuai dengan jumlah yang tercatat dalam pembukuan.

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (2016:197) menyatakan bahwa sistem pencatatan yang dapat digunakan dalam pengelolaan persediaan ada 2 (dua), yaitu:

1. Sistem Periodik

Sistem periodik mencatat persediaan hanya pada saat perhitungan fisik untuk mengetahui saldo akhir perusahaan. Perhitungan fisik persediaan dilakukan untuk menjamin keakuratan besarnya persediaan yang dilaporkan dalam laporan keuangan. Selain itu, juga untuk mengamankan atau mencegah aset perusahaan (persediaan) dari tindakan pencurian, penyelewengan, penyalahgunaan, dan kerusakan.

2. Sistem Perpetual

Sistem perpetual mencatat kuantitas persediaan dilakukan setiap terjadi perubahan nilai persediaan. Sistem pencatatan secara perpetual ini dapat memberikan pengendalian yang efektif atas persediaan, karena informasi mengenai persediaan dapat segera tersedia dalam buku besar pembantu untuk masing-masing persediaan. Dalam sistem pencatatan perpetual, hasil dari perhitungan fisik akan dibandingkan dengan data persediaan yang tercatat dalam buku besar untuk menentukan besarnya kekurangan yang ada atas saldo fisik persediaan. Dalam sistem pencatatan perpetual, pemeriksaan fisik dilakukan bukan untuk menghitung saldo akhir persediaan melainkan sebagai pengecekan saling mengenai keabsahan atas saldo persediaan yang dilaporkan dalam buku besar persediaan.

Sedangkan Mulyadi (2018:465) menjelaskan ada dua metode macam metode pencatatan persediaan yaitu:

1. Metode Mutasi Persediaan (*Perpetual Inventory Method*)

Dalam metode mutasi persediaan, setiap mutasi persediaan dicatat dalam kartu persediaan dicatat dalam kartu persediaan. Metode mutasi persediaan ini cocok untuk digunakan dalam penentuan biaya bahan baku dalam perusahaan yang harga pokok produknya dikumpulkan dengan metode harga pokok pesanan.

2. Metode Persediaan Fisik (*Physical Inventory Method*)

Dalam metode persediaan fisik, hanya penambahan persediaan dari pembelian saja yang dicatat, sedangkan mutasi berkurangnya persediaan tidak dicatat karena tidak memakai kartu persediaan. Untuk mengetahui berapa harga pokok persediaan yang dipakai atau dijual, harus dilakukan perhitungan fisik untuk mengetahui sisa persediaan yang masih ada di gudang pada akhir periode akuntansi. Harga pokok persediaan awal periode ditambah dengan harga pokok persediaan yang dibeli selama periode dikurangi dengan harga pokok persediaan pada akhir periode merupakan harga pokok persediaan yang dipakai selama periode akuntansi yang bersangkutan. Metode persediaan fisik ini cocok untuk digunakan dalam penentuan biaya bahan

baku dalam perusahaan yang harga pokok produknya dikumpulkan dengan metode harga pokok proses.

Sistem pencatatan persediaan menurut Kieso (2017:501) adalah sebagai berikut:

1. Sistem persediaan perpetual adalah sistem yang mencatat setiap pembelian dan penjualan barang secara langsung dalam akun Persediaan pada saat transaksi terjadi. Dengan kata lain, sistem ini selalu memantau perubahan dalam akun Persediaan. Sistem ini menyediakan catatan saldo yang selalu diperbarui dalam akun Persediaan dan akun Beban Pokok Penjualan.
2. Sistem persediaan periodik adalah sistem yang mencatat semua pembelian selama periode akuntansi dengan mendebit akun Pembelian. Pada akhir periode akuntansi, perusahaan menambahkan total pembelian ini ke biaya persediaan awal periode. Jumlah ini menentukan total beban pokok yang tersedia untuk dijual selama periode tersebut. Untuk menghitung beban pokok penjualan, perusahaan kemudian mengurangi persediaan akhir dari beban pokok yang tersedia untuk dijual. Dalam sistem ini, perusahaan secara berkala menentukan jumlah persediaan.

Berdasarkan sistem pencatatan persediaan di atas, dapat dinyatakan bahwa sistem pencatatan persediaan terbagi menjadi dua, yaitu sistem periodik dan sistem perpetual, pemilihan antara sistem persediaan perpetual dan periodik tergantung pada kebutuhan dan karakteristik perusahaan. Sistem perpetual ideal untuk perusahaan yang membutuhkan informasi persediaan secara *real-time* untuk pengambilan Keputusan yang cepat, seperti dalam pengelolaan stok atau perencanaan produksi. Sedangkan sistem periodik cukup untuk perusahaan yang tidak memerlukan pembaruan persediaan secara instan dan dapat menunggu hingga akhir periode akuntansi untuk mendapatkan data persediaan.

2.6 Metode Penilaian Persediaan

Permasalahan dalam menentukan saldo akhir persediaan dan beban pokok penjualan dalam sebuah perusahaan kemungkinan akan ada, hal tersebut timbul karena adanya persediaan barang dagang yang ada di perusahaan dibeli dengan harga yang tidak stabil selama satu periode (misalnya, satu bulan atau satu tahun). Maka dari itu perusahaan dapat menggunakan salah satu metode penilaian persediaan untuk memudahkan perusahaan dalam menentukan beban pokok penjualannya.

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (2016:198) terdapat tiga asumsi arus biaya yang bisa digunakan oleh perusahaan, yaitu:

1. *First in, first out* / Masuk Pertama Keluar Pertama (FIFO/MPKP), Metode FIFO mengasumsikan beban pokok persediaan yang pertama dibeli akan dijual atau digunakan terlebih dahulu. Nilai persediaan akhir adalah beban pokok dari unit atau barang yang terakhir kali dibeli.
2. Rata-rata Tertimbang (Average Cost Method), biaya unit persediaan merupakan biaya rata-rata pembelian.
3. *Last in, first out* / Masuk Terakhir Keluar Pertama (LIFO/MTKP), Metode LIFO mengasumsikan beban pokok persediaan dari barang yang terakhir dibeli adalah yang akan diakui pertama kali sebagai beban pokok penjualan. Tetapi metode ini tidak diperkenankan lagi oleh SAK.

Sedangkan menurut SAK EMKM (2018:57), Menentukan nilai persediaan akhir dan harga pokok penjualan (HPP) entitas dapat memilih 2 metode yaitu:

1. Metode MPKP-Perpetual
Dengan metode MPKP-Perpetual, diasumsikan bahwa barang dalam persediaan yang pertama kali dibeli akan dijual atau digunakan terlebih dahulu. Akibatnya, barang yang tertinggal dalam persediaan akhir adalah yang dibeli atau diproduksi kemudian. Selain itu, harga pokok penjualan (HPP) dicatat saat transaksi penjualan terjadi.
2. Metode Rata-Rata Tertimbang-Perpetual
Dengan metode Rata-Rata Tertimbang-Perpetual, diasumsikan bahwa biaya setiap barang ditentukan berdasarkan biaya rata-rata tertimbang dari persediaan awal periode dan persediaan yang dibeli atau diproduksi selama periode tersebut. Selain itu, harga pokok penjualan (HPP) dicatat saat transaksi penjualan terjadi.
3. Metode Periodik
Dengan metode Periodik, harga pokok penjualan (HPP) dihitung dan dicatat oleh entitas pada akhir periode pelaporan. Nilai persediaan akhir yang digunakan bergantung pada rumus biaya yang diterapkan. Jika menggunakan rumus MPKP, nilai persediaan akhir diasumsikan berdasarkan nilai pembelian terakhir. Sementara itu, jika menggunakan rumus rata-rata, nilai persediaan akhir didasarkan pada nilai pembelian rata-rata. Perhitungan persediaan barang dagang, HPP dihitung dengan cara berikut:

Persediaan awal	xxx
(+) Pembelian	xxx
(-) Persediaan akhir	<u>(xxx)</u>
(=) HPP	xxx

Menurut Warren, dkk (2018:348), Menghitung biaya persediaan terdapat 2 (dua) metode dalam sistem perpetual dan sistem periodik yaitu:

1. Metode Masuk-Pertama, Keluar-Pertama (FIFO)

Metode Masuk-Pertama, Keluar-Pertama (FIFO) yaitu biaya dimasukkan ke dalam beban pokok penjualan sesuai dengan urutan waktu terjadinya biaya tersebut, biaya perolehan paling akhir menjadi biaya sisa persediaan pada akhir periode. dengan kata lain setiap kali ada transaksi penjualan, barang yang memiliki tanggal kedaluwarsa atau masuk lebih awal akan diambil terlebih dahulu.

2. Metode Rata-Rata Tertimbang

Metode rata-rata tertimbang ialah setiap kali pembelian dilakukan biaya unit rata-rata tertimbang akan dihitung, biaya unit ini digunakan untuk menentukan beban pokok penjualan hingga pembelian berikutnya dilakukan dan nilai rata-rata baru dihitung. Teknik ini disebut rata-rata bergerak. Untuk menentukan beban pokok penjualan dan persediaan akhir menggunakan biaya unit rata-rata tertimbang. Jika pembelian selama satu periode relatif sama, metode rata-rata tertimbang memberikan hasil perhitungan biaya yang hampir sama dengan arus barang secara fisik.

Berdasarkan metode penilaian persediaan di atas, dapat dinyatakan bahwa metode penilaian persediaan terbagi menjadi beberapa metode. Pemilihan metode penilaian persediaan dalam menentukan saldo akhir persediaan dan beban pokok penjualan memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap keuangan perusahaan. Setiap metode penilaian persediaan yang telah dijelaskan diatas, akan menghasilkan nilai beban pokok penjualan yang berbeda-beda. Tetapi metode LIFO tidak diperkenankan lagi oleh SAK karena dengan laba yang kecil dapat dipergunakan perusahaan untuk memanipulasikan pajak dan dapat merugikan pemerintah.

2.7 Perbandingan Metode Penilaian Persediaan

Persediaan barang dagang harus dinilai dengan benar, karena jika terjadi kesalahan dalam menentukan penilaian persediaan barang dagang, maka dapat mengakibatkan kesalahan dalam menentukan persediaan akhir, beban pokok penjualan, maupun jumlah laba yang diperoleh oleh perusahaan. Dalam penentuan metode sistem penilaian persediaan untuk setiap metode yang dipilih tentunya akan terdapat perbandingan walaupun tidak terlalu signifikan.

Menurut Mayasari, dkk (2023:243) menyatakan bahwa Penggunaan metode FIFO dan rata-rata tertimbang dalam akuntansi akan menghasilkan arus biaya yang berbeda, yang mempengaruhi beban pokok penjualan, laba bruto, laba neto, dan persediaan akhir. Perbedaan ini disebabkan oleh adanya peningkatan harga barang. Dengan kata lain, ketika harga barang naik, metode FIFO dan rata-rata tertimbang

akan memberikan hasil yang berbeda dalam laporan keuangan. Namun, jika harga barang tetap atau tidak berubah, hasil yang diberikan oleh kedua metode tersebut akan sama, sehingga tidak ada perbedaan dalam beban pokok penjualan, laba bruto, laba neto, dan persediaan akhir.

Warren, dkk (2018:354) menyatakan bahwa metode persediaan FIFO dan rata-rata tertimbang biasanya akan menghasilkan jumlah yang berbeda untuk:

1. Beban pokok penjualan
2. Laba Bruto
3. Laba Neto
4. Persediaan Akhir

Perbedaan - perbedaan tersebut diakibatkan dari adanya kenaikan biaya (harga). Jika biaya (harga) tetap sama, kedua metode akan memberikan hasil yang sama. Berikut ini disajikan efek dari perubahan biaya (harga) pada metode FIFO dan rata-rata tertimbang. Berikut pengaruh perubahan biaya (harga) metode FIFO dan rata-rata tertimbang (WA).

Tabel 2.1
Pengaruh Perubahan Biaya (Harga) Perolehan Metode FIFO dan Rata-Rata Tertimbang (WA)

	+Peningkatan Biaya (Harga)		-Penurunan Biaya (Harga)	
	Jumlah Tertinggi	Jumlah Terendah	Jumlah Tertinggi	Jumlah Terendah
Beban Pokok Penjualan	WA	FIFO	WA	FIFO
Laba Bruto	FIFO	WA	WA	FIFO
Laba Neto	FIFO	WA	WA	FIFO
Persediaan Akhir	FIFO	WA	WA	FIFO

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan metode FIFO beban pokok yang dihasilkan lebih rendah, laba dan

persediaan akhir yang dihasilkan juga lebih tinggi dibandingkan metode rata-rata bergerak.

2.8 Akibat Kesalahan Pencatatan Persediaan

Entitas atau perusahaan yang tidak melakukan pencatatan persediaan akan mengakibatkan dalam kesalahan mencatat persediaan. Sebagaimana dikatakan oleh Mayasari, dkk bahwa:

“Kesalahan dalam melakukan perhitungan pada persediaan memengaruhi laporan laba rugi. Kesalahan tersebut akan menyebabkan salah saji pada saldo persediaan akhir karena persediaan merupakan aset lancar maka besarnya aset lancar maupun total aset perusahaan secara keseluruhan juga akan menjadi salah saji di dalam laporan posisi keuangan. Tidak hanya itu, kesalahan dalam perhitungan pada persediaan tersebut juga akan menyebabkan besarnya harga pokok penjualan, laba bruto, dan laba neto yang tersaji dalam laporan laba rugi menjadi keliru” Mayasari, dkk (2023:244).

Beberapa alasan mengapa terjadinya kesalahan persediaan menurut Warren, dkk (2018:358) adalah sebagai berikut:

1. Persediaan fisik yang ada di tangan salah hitung.
2. Biaya-biaya dialokasikan secara tidak benar ke dalam persediaan. Contoh: Metode FIFO, atau rata-rata tertimbang diterapkan secara tidak benar.
3. Persediaan yang ada di pengiriman dimasukkan secara tidak benar atau dikeluarkan dari persediaan.
4. Persediaan konsinyasi dimasukkan secara tidak benar atau dikeluarkan dari persediaan.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kesalahan dalam mencatat jumlah nilai persediaan barang akan mempengaruhi laba dalam laporan laba rugi dan mempengaruhi jumlah nilai persediaan dalam laporan posisi keuangan.